**IMPLEMENTASI DAN DAMPAK PROGRAM BANTUAN LANGSUNG   
TUNAI (BLT) TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT   
DI PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh:**

**Cezzya Febiola Sinaga**

**2416041105**

**Tugas Mata Kuliah**

**Metode Penelitian Administrasi Publik**



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2025**

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai implementasi dan dampak program Bantuan Langsung Tunai telah banyak dilakukan oleh para peneliti dengan berbagai fokus dan pendekatan. Penelitian-penelitian terdahulu ini menjadi referensi penting dalam memahami dinamika pelaksanaan program BLT serta dampaknya terhadap masyarakat. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini:

**Tabel 1.** Kajian Perbandingan Penelitian

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Peneliti** | **Judul Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| 1 | Ummi Nurul Azizah (2024) | Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Janti Slahung Ponorogo | Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III dengan 4 indikator utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program BLT sudah berjalan dengan baik pada sebagian besar indikator, namun masih terdapat kelemahan signifikan pada aspek komunikasi terutama kejelasan informasi kepada masyarakat. Sosialisasi program belum merata dan masih banyak masyarakat yang tidak memahami prosedur serta kriteria penerima BLT. Dari segi dampak, penelitian ini menemukan bahwa dana BLT sebesar Rp 300.000 per bulan yang diberikan kepada 28 KPM di Desa Janti hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan belum dapat menutupi keseluruhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kecemburuan sosial akibat ketidakpahaman masyarakat terhadap kriteria penerima bantuan. |
| 2 | Yasi Ali Anbiya (2025) | Pelaksanaan Program BLT Desa Ngrupit Dan Dampaknya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus fenomenologi untuk menganalisis pelaksanaan BLT di Dusun Gentan, Desa Ngrupit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program BLT sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dalam mengelola dana secara mandiri dan kreatif. Penelitian menemukan bahwa masyarakat dituntut untuk memiliki literasi keuangan yang baik agar dapat memaksimalkan manfaat dari dana bantuan. Tantangan utama yang diidentifikasi adalah kurangnya pendampingan dan sosialisasi mengenai pengelolaan dana yang produktif. Sebagian masyarakat masih menggunakan dana BLT untuk keperluan konsumtif saja tanpa mempertimbangkan aspek produktivitas jangka panjang. Penelitian ini juga menemukan bahwa diperlukan evaluasi berkala dari pemerintah untuk memastikan efektivitas program dan perbaikan mekanisme penyaluran. |
| 3 | M Adi Pratama Putra, Alfinda Adellia Dirli, Wilda Andriani, Reza Mauldy Raharja (2023) | Menggali Efektivitas Bantuan Langsung Tunai dalam Membantu Masyarakat | Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis literatur dan data empiris untuk mengukur dampak BLT terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa BLT memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Namun efektivitas program sangat tergantung pada tiga faktor kritis yaitu desain program yang tepat, mekanisme seleksi penerima yang akurat, dan sistem distribusi yang efisien. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan implementasi seperti biaya administratif yang tinggi, masalah ketepatan sasaran, dan isu-isu kebijakan di tingkat operasional. Temuan penting lainnya adalah bahwa keberhasilan BLT memerlukan implementasi yang cermat berbasis bukti empiris serta koordinasi yang baik dengan kebijakan sosial lainnya untuk mencapai dampak optimal. |
| 4 | Raudatul Ratna Wati, Prayitno Basuki, Irwan Suriadi (2023) | Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Lingkungan Punia Karang Kateng Kelurahan Punia Kecamatan Mataram | Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif yang melibatkan 52 KK penerima BLT BBM di Lingkungan Punia Karang Kateng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BLT BBM sebesar Rp 600.000 yang disalurkan dalam dua tahap berhasil membantu masyarakat penerima dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak goreng, dan keperluan rumah tangga lainnya. Pemanfaatan dana sejalan dengan tujuan program yaitu menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga BBM. Namun penelitian menemukan bahwa meskipun BLT dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar, program ini tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung dan berkelanjutan. Keterbatasan nominal bantuan dan periode penyaluran yang relatif singkat menjadi faktor pembatas dampak jangka panjang program. |
| 5 | Rizaldy Tumbel, Burhanuddin Kiyai, Rully Mambo (2021) | Dampak Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa | Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menganalisis dampak BLT terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan program BLT memberikan bantuan terbatas kepada masyarakat kurang mampu terutama selama masa pandemi meskipun belum mencapai hasil optimal. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas program antara lain data penerima yang tidak akurat, cakupan program yang belum menyeluruh sehingga masih ada masyarakat kurang mampu yang tidak tersentuh bantuan, pengelolaan dana yang tidak sesuai kebutuhan oleh sebagian penerima, dan keterlambatan dalam proses pencairan tanpa pemberitahuan yang jelas. Penelitian ini juga menemukan dampak positif berupa peningkatan pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan modal usaha kecil, meskipun sifatnya masih terbatas dan berjangka pendek. |
| 6 | Sepriani Banawa, Sukadji Sarbi, Muzani Zulmaizar (2021) | Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Desa Malimbong Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa | Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif evaluatif dengan melibatkan 42 orang responden yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda, dan perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BLT memberikan beragam manfaat bagi masyarakat terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat kurang mampu yang masuk dalam kategori belum sejahtera. Namun temuan signifikan menunjukkan bahwa dana BLT sebesar Rp 300.000 per bulan tidak mampu meningkatkan taraf kehidupan secara signifikan dan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Penelitian ini juga mengidentifikasi dampak negatif berupa ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah yang dapat menumbuhkan sikap pasif dan budaya malas dalam bekerja. Selain itu terdapat masalah ketidaktepatan sasaran dimana beberapa penerima bantuan sebenarnya tidak memenuhi kriteria sebagai keluarga kurang mampu. |

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terlihat bahwa program BLT memberikan dampak yang beragam bagi masyarakat. Sebagian besar studi menunjukkan bahwa BLT bermanfaat dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar, namun belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan. Penelitian-penelitian tersebut juga menyoroti sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya, antara lain ketepatan sasaran penerima, kejelasan informasi yang disampaikan, efektivitas pengelolaan dana, serta potensi munculnya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah.

Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus wilayah kajian yaitu Provinsi Lampung, serta penekanan pada aspek pemberdayaan masyarakat sebagai hasil yang diharapkan dari program BLT. Selain itu, penelitian ini berupaya melakukan analisis yang lebih menyeluruh terhadap implementasi dan dampak program dengan mempertimbangkan konteks lokal serta karakteristik sosial ekonomi masyarakat Lampung yang memiliki ciri khas tersendiri.

**2.2 Landasan Teori**

**2.2.1 Teori Administrasi Publik**

Administrasi publik sebagai sebuah bidang ilmu sudah berkembang sejak akhir abad ke-19. Salah satu tokoh pentingnya adalah Woodrow Wilson melalui esainya *The Study of Administration* (1887). Wilson menekankan bahwa politik dan administrasi perlu dipisahkan, serta menyoroti pentingnya efisiensi dalam pemerintahan. Baginya, administrasi publik harus dijalankan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas seperti di dunia bisnis, tetapi tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

Dalam penelitian ini, teori administrasi publik dijadikan landasan utama karena program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan contoh nyata bagaimana negara hadir memberikan pelayanan kepada warganya. Sejalan dengan konsep *New Public Service*, peran administrator publik adalah melayani warga negara, bukan hanya memperlakukan mereka sebagai konsumen. Pandangan ini sangat sesuai dengan tujuan BLT yang ditujukan untuk membantu kelompok masyarakat rentan agar tetap mendapatkan perlindungan sosial dari negara.

Saat ini, administrasi publik tidak lagi dipandang sekadar urusan teknis, melainkan juga berkaitan dengan aspek politik, sosial, dan etika. Ada tiga perspektif utama dalam administrasi publik: manajerial, politik, dan legal. Dalam pelaksanaan BLT, ketiganya saling terkait. Keputusan manajerial mengenai pembagian sumber daya harus sejalan dengan arah politik yang mendorong pemberdayaan masyarakat, dan pada saat yang sama tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku.

**2.2.2 Teori Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan publik adalah tahap penting yang menentukan keberhasilan suatu program. George C. Edwards III (1980) dalam bukunya *Implementing Public Policy* menjelaskan empat variabel utama yang berpengaruh dalam proses implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi  
   Komunikasi meliputi aspek transmisi, kejelasan dan konsistensi. Edwards III (1980) menegaskan bahwa implementasi akan lebih berhasil ketika perubahan yang diperlukan tidak terlalu besar dan tujuan dipahami dengan baik. Dalam program BLT komunikasi yang efektif memastikan informasi mengenai tujuan, kriteria penerima dan mekanisme penyaluran tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat sasaran.  
   Penelitian Azizah (2024) menemukan bahwa kurangnya komunikasi menjadi hambatan besar di Desa Janti karena sosialisasi program tidak merata. Akibatnya warga masih bingung mengenai prosedur dan kriteria penerima. Temuan ini memperkuat pandangan Edwards bahwa komunikasi yang tidak jelas membuat kebijakan sulit mencapai hasil optimal.
2. Sumber Daya

Sumber daya mencakup tenaga kerja, informasi, kewenangan dan fasilitas. Edwards III (1980) menegaskan bahwa kebijakan tidak akan berjalan tanpa sumber daya yang cukup. Ketersediaan sumber daya baik dari segi jumlah maupun kualitas menjadi syarat penting keberhasilan implementasi.  
Dalam program BLT kompetensi sumber daya manusia sangat menentukan terutama dalam pendataan, verifikasi dan penyaluran bantuan. Anbiya (2025) menemukan bahwa di Desa Ngrupit pembagian tugas sudah jelas sehingga penyaluran berjalan baik. Namun tidak semua daerah memiliki kondisi serupa sehingga aspek sumber daya tetap harus mendapat perhatian.

1. Disposisi  
   Disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen pelaksana kebijakan. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa sikap positif membuat pelaksana lebih bersemangat menjalankan kebijakan sesuai tujuan awal.  
   Dalam BLT disposisi terlihat dari kesediaan aparat desa dan petugas lapangan untuk melayani masyarakat secara adil serta bertanggung jawab dalam menyalurkan bantuan. Jika disposisi kurang baik maka bisa muncul masalah seperti pilih kasih atau bahkan korupsi yang merugikan masyarakat.
2. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan prosedur standar dan pembagian organisasi. Edwards III (1980) menyebut semakin panjang rantai birokrasi semakin besar potensi hambatan komunikasi dan penyimpangan. Struktur birokrasi yang rumit akan membuat implementasi berjalan lambat.  
Pada program BLT struktur birokrasi yang sederhana dengan prosedur jelas sangat membantu koordinasi dari pemerintah pusat hingga desa. Penelitian Tumbel dkk. (2021) menunjukkan adanya keterlambatan pencairan dan kurangnya informasi kepada penerima sebagai tanda struktur birokrasi belum optimal.

1. Teori Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola didefinisikan sebagai pelaksanaan kewenangan ekonomi, politik dan administratif dalam mengelola urusan negara di setiap level. Prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, daya tanggap, keadilan, efektivitas, efisiensi, partisipasi dan konsensus.  
Dalam BLT prinsip transparansi berarti proses penentuan penerima dan penyaluran dana dapat diakses oleh publik. Akuntabilitas menuntut pelaksana bertanggung jawab atas kinerjanya. Partisipasi membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan dan pengawasan. Dengan penerapan prinsip tersebut BLT tidak hanya tersalurkan tetapi juga benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

**2.2.3 Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat menjadi konsep penting dalam penelitian ini karena tujuan utama program BLT tidak hanya memberi bantuan konsumtif, tetapi juga mendorong kemandirian serta peningkatan kapasitas warga. Pemberdayaan berarti memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat agar mereka mampu menentukan masa depan, berpartisipasi, dan turut memengaruhi kehidupan komunitasnya.

Anbiya (2025) menemukan bahwa penerima BLT perlu mengelola dana dengan bijak untuk kebutuhan jangka panjang, bukan hanya untuk konsumsi sesaat. Kemampuan mengatur keuangan serta keterampilan dalam mengelola sumber daya sangat menentukan apakah BLT dapat benar-benar mendorong pemberdayaan atau justru memperkuat ketergantungan.

**2.2.4 Konsep Program Bantuan Langsung Tunai**

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu instrumen kebijakan sosial yang dirancang untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan. Putra dkk. (2023) menjelaskan bahwa BLT adalah bentuk bantuan ekonomi yang diberikan kepada individu atau keluarga melalui uang tunai maupun transfer elektronik dengan tujuan utama mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta membantu kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Keberhasilan BLT tidak hanya diukur dari sejauh mana dana dapat tersalurkan, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian Wati dkk. (2023) menunjukkan bahwa BLT BBM memang membantu memenuhi kebutuhan dasar, namun tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan jangka panjang karena jumlah bantuan relatif kecil dan periode penyaluran yang singkat. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas program sangat dipengaruhi oleh desain kebijakan yang diterapkan.

**2.2.5 Konsep Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan program BLT dalam mendukung proses pemberdayaan. Badan Pusat Statistik (BPS, 2020) menetapkan delapan indikator kesejahteraan yang meliputi pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, kondisi tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, akses terhadap layanan kesehatan, kemudahan memperoleh pendidikan bagi anak, serta ketersediaan fasilitas transportasi.

Penelitian Azizah (2024) menggunakan empat indikator kesejahteraan yaitu pendapatan, kondisi tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan untuk melihat dampak BLT. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BLT lebih banyak berkontribusi pada peningkatan pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi belum memberikan pengaruh besar terhadap aspek kesejahteraan lainnya.

kesejahteraan sosial sebaiknya dipahami dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, program bantuan seperti BLT tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga harus mendorong peningkatan kapasitas produktif masyarakat agar mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.

**2.2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program**

Efektivitas pelaksanaan program BLT dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup kapasitas organisasi pelaksana, ketersediaan sumber daya, dan kualitas sumber daya manusia. Sementara faktor eksternal terkait dengan dukungan masyarakat, kondisi sosial ekonomi, serta koordinasi antar lembaga.

Tumbel dkk. (2021) mengidentifikasi sejumlah kendala dalam implementasi BLT, seperti ketidakakuratan data penerima, cakupan program yang terbatas, penggunaan dana yang kurang sesuai kebutuhan, serta keterlambatan pencairan. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan pada aspek teknis maupun manajerial program agar tujuan dapat tercapai dengan lebih baik.

Banawa dkk. (2021) juga menyoroti persoalan pendataan sebagai kelemahan utama. Banyak warga tidak mengetahui kriteria keluarga miskin yang berhak menerima BLT bahkan tidak paham kapan proses pendataan dilakukan. Situasi ini menegaskan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan.

Berdasarkan landasan teori yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa implementasi dan dampak BLT terhadap pemberdayaan masyarakat merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada kelancaran teknis penyaluran bantuan, tetapi juga pada berbagai faktor kontekstual yang menentukan sejauh mana BLT mampu mewujudkan tujuan pemberdayaan secara berkelanjutan.

**2.3 Kerangka Berpikir**

Penelitian ini melihat bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah salah satu kebijakan pemerintah yang hadir untuk meringankan beban masyarakat miskin dan rentan. Di Provinsi Lampung, BLT dipandang bukan hanya sekadar bantuan sementara untuk menjaga daya beli, tetapi juga memiliki potensi mendorong proses pemberdayaan masyarakat agar mereka bisa lebih mandiri dalam jangka panjang.

Untuk memahami hal tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa konsep utama. Pertama, dari sisi implementasi kebijakan, teori George Edward III menjadi dasar untuk melihat bagaimana komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi berpengaruh pada jalannya program. Implementasi yang baik memastikan bantuan sampai ke masyarakat tepat sasaran dan sesuai tujuan.

Kedua, dari sisi dampak program, BLT dilihat tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga apakah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan menurut BPS dan pandangan Midgley menunjukkan bahwa kesejahteraan seharusnya tidak berhenti pada konsumsi harian saja, melainkan juga pada kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

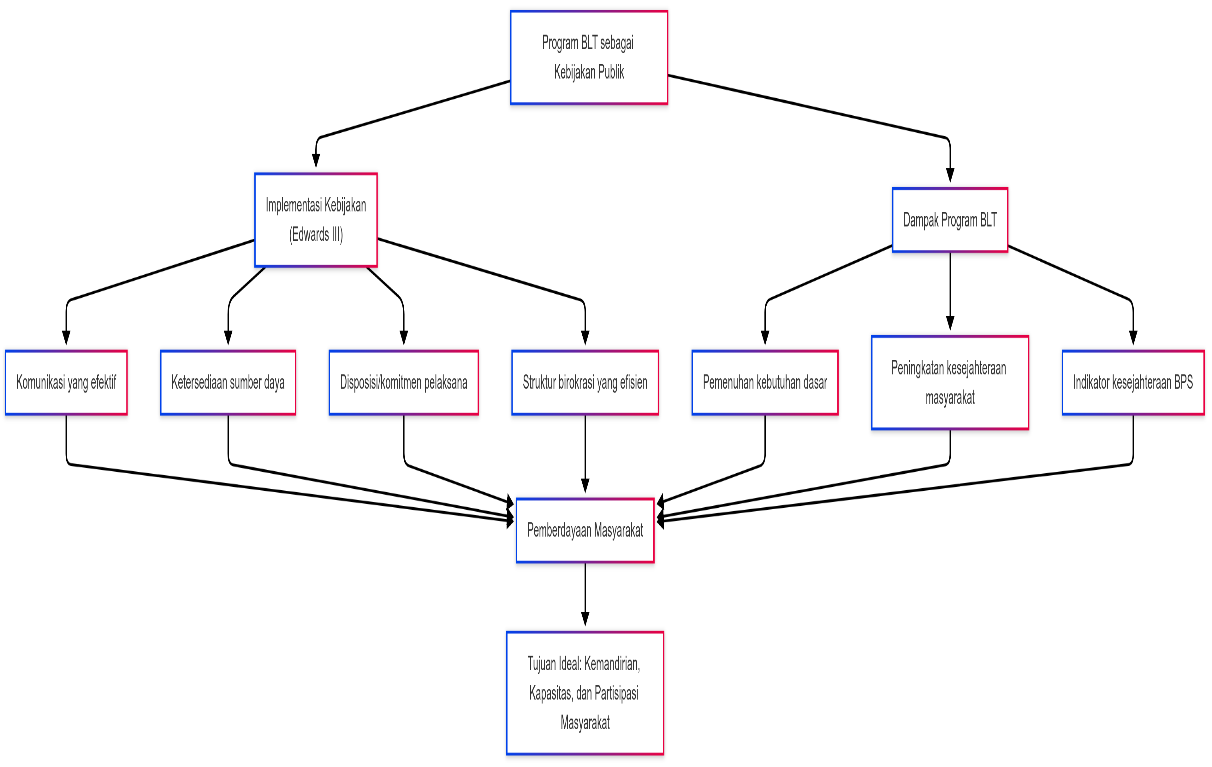
Ketiga, dari sisi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan adalah proses yang membuat masyarakat lebih mampu, percaya diri, dan berpartisipasi dalam mengelola kehidupannya. Dengan begitu, BLT seharusnya tidak hanya menciptakan ketergantungan, tetapi justru menjadi titik awal bagi peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat.

Berdasarkan pemikiran tersebut, kerangka penelitian ini menekankan dua jalur utama:

1. Implementasi kebijakan – yang menentukan bagaimana BLT dijalankan di lapangan.
2. Dampak BLT – yang terlihat dari perubahan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kedua jalur ini kemudian bermuara pada tujuan yang sama, yaitu pemberdayaan masyarakat.

**Gambar 1.** Kerangka Berpikir



**DAFTAR PUSTAKA**

Anbiya, Y. A. (2025). Pelaksanaan Program BLT Desa Ngrupit Dan Dampaknya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Azizah, U. N. (2024). Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Janti Slahung Ponorogo (Doctoral dissertation, IAIN).

Banawa, S., Sarbi, S., & Zulmaizar, M. (2021, December). Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap Masyarakat Desa Malimbong Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa. In Journal Peqguruang: Conference Series (Vol. 3, No. 2, pp. 680-687).

Edwards, G. C. (1980). Implementing public policy. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press. <https://archive.org/details/implementingpubl0000edwa/mode/2up>

Putra, M. A. P., Dirli, A. A., Andriani, W., & MauldyRaharja, R. (2023). Menggali Efektivitas Bantuan Langsung Tunai dalam Membantu Masyarakat. Concept: Journal of Social Humanities and Education, 2(4), 189-205.

Tumbel, R., Kiyai, B., & Mambo, R. (2021). Dampak kebijakan program bantuan langsung tunai dengan kondisi ekonomi masyarakat di kelurahan talikuran kecamatan kawangkoan utara kabupaten minahasa. Jurnal Administrasi Publik, 7(110).

Wati, R. R., Basuki, P., & Suriadi, I. (2023). Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Lingkungan Punia Karang Kateng, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram. Jurnal Oportunitas: Ekonomi Pembangunan, 2(2).